

## BAB II

### LAHIRNYA BUDI UTOMO

#### A. Kondisi Masyarakat Jawa Masa Pergerakan Nasional

Penguasaan Belanda di Indonesia menempatkan pulau Jawa sebagai pusat pemerintahan pada masa pergerakan nasional. Keberhasilan Belanda dalam menempatkan kekuasaannya di pulau Jawa tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan pemerintah Hindia-Belanda dalam menekan kedudukan masyarakat Jawa. Upaya penekanan berupa defeodalisasi ditujukan untuk membuat pemerintah Hindia-Belanda dengan mudah mengontrol bangsawan Jawa agar menjadi bawahan mereka serta memperkuat kekuasaan mereka di Indonesia.<sup>1</sup> Proses tersebut tidaklah berlangsung singkat. Upaya defeodalisasi terhadap kedudukan masyarakat Jawa sudah berlangsung lama mulai dari masa VOC hingga masa pemerintahan kolonial seperti Gubernur Jenderal Daendels dan Gubernur Jenderal Raffles.<sup>2</sup>

Defeodalisasi<sup>3</sup> yang sudah berlangsung sejak lama tersebut belum berhasil melepaskan ikatan tuan dan hamba yang terbentuk di masyarakat Jawa. Lantas

---

<sup>1</sup> Akira Nagazumi, *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia : Budi Utomo 1908-1918* (Jakarta: Pustaka Utama, 1989), hlm. 13-15.

<sup>2</sup> Heather Sutherland, *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi* (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1983), hlm. 34-37.

<sup>3</sup> Upaya untuk melepas ikatan feodal yang terdapat dalam suatu masyarakat, dalam konteks masa pergerakan nasional di Indonesia bisa juga diartikan sebagai upaya pemerintah Hindia Belanda memegang kendali terhadap kekuasaan priyayi birokrat di masyarakat (Selengkapnya baca Akira Nagazumi, *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia : Budi Utomo 1908-1918* hlm. 13)

apa yang membuat upaya defeodalisasi kepada masyarakat Jawa belum berhasil ? Hal ini bisa terjawab dengan melihat kondisi struktur masyarakat Jawa secara menyeluruh khususnya pada masa Mataram Islam. Di masa Mataram Islam, wilayah kerajaan terbagi menjadi empat macam yaitu : *Nagara*, *Nagara Agung*, *Mancanagara* dan *Pasisir*. Empat macam wilayah kerajaan tersebut memiliki kedudukan yang berbeda-beda. *Nagara* merupakan daerah inti/ibukota kerajaan, *Nagara Agung* adalah daerah yang terletak di luar dan di sekitar *Nagara*, *Mancanagara* ialah daerah yang terletak di luar *Nagara Agung* serta *Pasisir* yang merupakan daerah *Mancanagara* di sekitar pantai utara Jawa mulai dari Cirebon sampai Surabaya.<sup>4</sup> Keempat wilayah kerajaan tersebut memiliki penguasaan tersendiri meskipun pada dasarnya mereka tunduk terhadap raja Mataram Islam.<sup>5</sup> Oleh karena itu kedudukan wilayah *Mancanagara* ataupun *Pasisir* bukanlah suatu kesatuan administrasi pemerintahan melainkan hanya sekelompok *Nagara* yang masing-masing *Nagara* tersebut tunduk kepada raja Mataram Islam.<sup>6</sup>

Diantara empat wilayah tersebut, kedudukan *Mancanagara* serta *Pasisir* adalah yang paling otonom. Ini dikarenakan para bupati merupakan pemimpin sebenarnya dari daerah yang ia pimpin, sedangkan kekuasaan Mataram Islam hanyalah bayang-bayang di daerah tersebut. Keotonaman kedudukan

<sup>4</sup> Denys Lombard, *Nusa Jawa : Silang Budaya Kajian Sejarah Terpadu Bagian I : Batas-Batas Pembaratan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 104-105

<sup>5</sup> Wilayah *Nagara* dikuasai secara penuh oleh raja, wilayah *Nagara Agung* dikuasai oleh *bekel* yang berkedudukan sebagai wakil bangsawan atau pembesar istana yang mempunyai *pelungguh*, serta wilayah *Mancanagara* dan *Pasisir* yang dipimpin oleh seorang bupati yang tunduk kepada raja Mataram Islam.

<sup>6</sup> Sartono Kartodirdjo, *Perkembangan Peradaban Priyayi* (Yogyakarta: UGM Press, 1987), hlm. 11-12.

*Mancanagara* serta *Pasisir* terlihat dari kewajiban yang dimiliki para bupati di daerah tersebut lebih sedikit dibandingkan kewajiban seorang *bekel* yang mengatur di daerah *Nagara*.<sup>7</sup>

Kedudukan para bupati di daerahnya tersebut adalah sebagai aristokrasi lokal yang memegang peranan baik di bidang politik, militer, ataupun ekonomi. Kedudukan dalam jabatan mereka diteruskan secara turun-temurun. Sebagai seorang elit sosial di daerahnya mereka mempunyai adat, lambang dan upacara tersendiri sebagai bentuk kebudayaan istananya. Hal ini sama dengan yang terdapat di istana raja Mataram Islam. Kebudayaan istana tersebut direpresentasikan melalui berbagai hal-hal simbolis dan berperan penting untuk menjaga keutuhan sistem feodal yang ada, serta tetap menjunjung secara tinggi tradisi istana khususnya terkait upacara.<sup>8</sup> Upacara-upacara yang merupakan kebudayaan istana dari para bupati tidak hanya memiliki fungsi magis seperti pada masa Hindu-Buddha. Upacara pada masa ini juga berfungsi untuk memperkuat solidaritas, memperkuat lambang identitas kelompok aristokrasi lokal serta mengarahkan peranan para pelaku dan menuntut partisipasi rakyat yang terlibat. Imbas dari hal ini adalah terciptanya hubungan sosial dan transaksi sosial antara bupati dengan masyarakat terjalin ketika upacara berlangsung.

---

<sup>7</sup> Beberapa kewajiban bupati terhadap raja antara lain membayar upeti, menghadap raja pada bulan tertentu serta menyediakan tenaga manusia pada waktu raja memerlukan. Sedangkan *bekel* memiliki kewajiban yang lebih banak akibat kedudukannya yang berada langsung dibawah pembesar istana. (Selengkapnya baca Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru : 1500-1900 Dari Emporium Sampai Imperium*, hlm. 174-175.)

<sup>8</sup> Sartono Kartodirdjo, *op. cit.*, hlm. 13.

Transaksi sosial yang terjadi antara bupati dan masyarakat seperti pemberian hadiah, pemberian benda ataupun saling balas budi tercipta di dalam suasana upacara yang penuh dengan sifat sakral magis. Transaksi sosial tersebut tercipta berkat budaya masyarakat tradisional Jawa yang menganggap orang-orang dengan kedudukan tinggi (dalam hal ini para bupati) tidak hanya dipandang sebagai orang terkemuka, terhormat dan berwibawa. Tetapi juga sebagai sosok orang tua yang menjadi tempat berlindung, baik dalam bidang jasmani maupun rohani, bagi masyarakat sekitar pada umumnya dan sanak-saudara khususnya.<sup>9</sup>

Hal lain yang membuat feodalisme di Jawa tertanam kuat adalah tingkat kebangsawanan<sup>10</sup> para aristokrat Jawa yang selalu tinggi. Tingginya tingkat kebangsawanan aristokrat Jawa tercipta sebagai akibat dari prinsip aristokrasi Jawa yang tidak tertutup dan sekaku seperti aristokrasi Barat. Meskipun kebangsawanan para aristokrat Jawa suatu saat akan turun akibat makin jauhnya tingkat kebangsawanan suatu generasi dari raja yang menurunkannya, tingkat kebangsawanan tersebut tetap dapat dipulihkan. Pemulihan tersebut dilakukan melalui pernikahan politik baik dengan seorang pangeran ataupun dengan seorang putri raja yang akan membuat kadar kebangsawanan aristokrat tersebut pulih kembali.<sup>11</sup> Tingginya kadar kebangsawanan para aristokrat Jawa inilah yang

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 63-66.

<sup>10</sup> Dalam struktur masyarakat Jawa, tingkat kebangsawanan seseorang dilihat melalui beberapa kriteria antara lain : garis keturunan, rasa kemanusiaan yang dimiliki, cara berbicara dan bertingkah laku (Selengkapnya baca Clifford Geertz, *Agama Jawa Abangan, Santri, Priyayi Dalam Kebudayaan Jawa* hlm. 329-331)

<sup>11</sup> Denys Lombard, *op. cit.*, hlm. 104.

membuat kedudukan mereka selalu terpandang di mata masyarakat. Bertahannya nilai-nilai simbolis sebagai representasi kebudayaan istana serta tingginya kadar kebangsawanan para aristokrat Jawa menjadi dua alasan mengapa feodalisme di Jawa tetap kuat, hingga membuat bangsa Barat sangat sulit untuk melakukan defeodalisasi terhadap masyarakat Jawa.

Pemerintah Hindia Belanda telah menanam benih defeodalisasi di masyarakat Jawa sejak tahun 1819. Pada tahun tersebut pemerintah Hindia Belanda mulai menerapkan kebijakan yang sebelumnya dikeluarkan Gubernur Jenderal Raffles pada tahun 1816 terkait kedudukan bupati.<sup>12</sup> Kebijakan tersebut membuat para bupati tidak lagi menjadi penguasa otonom di daerahnya dan digeser menjadi birokrat-birokrat pribumi pada sistem administrasi pemerintahan kolonial.<sup>13</sup> Para birokrat ini merupakan satu korps karena ikatan profesi, tetapi juga karena unsur-unsur kekerabatan sebab anggota-anggota korps ini berasal dari satu kelompok sosial yaitu aristokrasi lokal. Korps ini merupakan satu kelompok sosial yang seolah-olah memonopoli jabatan-jabatan *pangreh praja*, terutama jabatan pimpinan, dan biasanya disebut dengan istilah priyayi.<sup>14</sup> Kedudukan para bupati yang bergeser tersebut akhirnya menciptakan struktur pemerintahan Hindia-

---

<sup>12</sup> Pada saat itu Raffles menerapkan kebijakan *landrent system* yang berimbas pada perubahan kedudukan bupati dari seorang aristokrat lokal menjadi seorang petugas kepolisian pribumi (Selengkapnya baca Bernard Vlekke, *Nusantara Sejarah Indonesia*, hlm. 248-249.)

<sup>13</sup> Perubahan berlaku tidak hanya pada tingkat bupati, tetapi juga hingga tingkatan bawah seperti patih, wedana dll. Selama orang tersebut merupakan bagian dari *pangreh praja* maka orang tersebut adalah golongan priyayi (Selengkapnya baca Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* hlm. 278.)

<sup>14</sup> Sartono Kartodirdjo, *op. cit.*, hlm. 18.

Belanda yang merupakan bentuk paling akhir pada tahun 1874. Struktur pemerintahan Hindia-Belanda terbagi sebagai berikut :

<b>Struktur Pemerintahan Hindia-Belanda</b>	
Gubernur Jenderal	
Residen	
Asisten Residen	Bupati
	Patih
Kontrolir	Wedana
Aspiran Kontrolir	Asisten Wedana
Mantri <sup>15</sup>	

Dalam menerapkan kebijakan tersebut, pemerintah Hindia-Belanda sadar bahwa mereka tidak boleh sampai merusak kedudukan golongan priyayi dan harus menjaga keutuhan mereka sebagai satu kesatuan demi memuluskan upaya mereka demi kepentingan eksploitasi kolonial.<sup>16</sup> Hal ini dikemukakan oleh Van den Bosch yang memprakarsai kebijakan *cultuurstelsel* melalui tulisannya tahun 1833 yang berisi :

Menurut saya dengan segala cara, kita harus membuat agar para pemimpin pribumi bergantung kepada kita; itulah yang saya coba lakukan, sedapat mungkin dengan selalu menghormati hak-hak mereka yang turun temurun dengan menjaga agar mereka diperlakukan dengan kehormatan yang semestinya, bahkan dengna penuh perhatian, selalu memberi bantuan jika mereka mendapat kesulitan keuangan, dan

<sup>15</sup> Akira Nagazumi, *op. cit.*, hlm. 15.

<sup>16</sup> Bernard Vlekke, *Nusantara Sejarah Indonesia* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2015), hlm. 195.

memberikan hak milik atas tanah yang mereka incar – singkatnya berbuat sedemikian rupa sehingga mereka merasa lebih berbahagia berada di bawah pemerintahan kita daripada ketika berada dibawah pemerintahan raja mereka.<sup>17</sup>

Alhasil, pemerintah Hindia-Belanda tetap mempertahankan hubungan tradisional antara golongan priyayi dengan masyarakat di daerahnya yang bersifat feodal. Unsur-unsur yang menunjukkan kewibawaan feodal golongan priyayi tetap dipertahankan seperti lambang-lambang, upacara, gaya hidup hingga pemakaian gelar kebangsawanan beserta atribut-atributnya.<sup>18</sup> Pemerintah Hindia-Belanda hanya membatasi dan menertibkan unsur-unsur penunjuk kewibawaan golongan priyayi agar tidak berlebihan demi menjaga keseimbangan dengan penghasilan golongan priyayi yang sudah diatur pemerintah Hindia-Belanda. Hubungan politik golongan priyayi juga diawasi serta dikendalikan oleh pemerintahan Hindia-Belanda.<sup>19</sup>

Disamping aturan terkait kewibawaan feodal yang dimiliki golongan priyayi serta dihapusnya hubungan feodal yang bersifat ekonomis, pemerintah Hindia-Belanda juga mengeluarkan kebijakan terkait pengisian kedudukan seorang bupati. Sejak tahun 1836 pemerintah Hindia-Belanda menetapkan secara konstitusional posisi bupati sebagai basis kekuasaannya pada *regeerings-reglement* (RR) pasal 67 dan pada RR pasal 69 ayat 4 tahun 1854. Dalam RR 1854 pada pokoknya menyatakan bahwa “bilamana ada lowongan bupati yang

---

<sup>17</sup> Denys Lombard, *op. cit.*, hlm. 106.

<sup>18</sup> Heather Sutherland, *op. cit.*, hlm. 38-39.

<sup>19</sup> Sartono Kartodirdjo, *op. cit.*, hlm. 19.

pertama-tama berhak mengisi ialah seorang anak atau saudara-saudara dari bupati yang meninggalkan jabatan itu.”<sup>20</sup> Aturan yang dikeluarkan pemerintah Hindia-Belanda tersebut memperkuat fakta bahwa pada awalnya golongan priyayi merupakan golongan khusus yang hanya boleh diisi oleh anak atau saudara dari keluarga bangsawan tersebut.<sup>21</sup> Golongan-golongan priyayi ini nantinya pada masa awal pergerakan nasional akan lebih dikenal dengan nama golongan priyayi birokrat.

Upaya defeodalisasi terhadap masyarakat Jawa yang sudah dilakukan sejak tahun 1819 nantinya akan diperkuat dengan tiga kebijakan pemerintah Hindia-Belanda selama periode 1874 hingga tahun 1903. Upaya defeodalisasi tersebut semakin digencarkan oleh pemerintah Hindia-Belanda dalam rangka membentuk kesinambungan dengan kebijakan negeri induk yang terus mengalami perubahan konstelasi politik di pemerintahan.<sup>22</sup> Demi mencapai tujuan defeodalisasi masyarakat Jawa, pemerintah Belanda lantas mengeluarkan tiga kebijakan secara bergantian. Tiga kebijakan tersebut antara lain restrukturisasi sistem pemerintahan daerah, kebijakan politik etis serta desentralisasi pemerintahan.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 19

<sup>21</sup> Selain dari aturan tersebut, keterkaitan golongan priyayi dengan golongan bangsawan bisa dilihat secara etimologi. Priyayi berasal dari kata *para yayi* (para adik), yang dimaksud adik raja. Etimologi rakyat Jawa yang berkembang di masyarakat bahwa priyayi dari kata *para yayi* telah menyiratkan makna bahwa kata ini dipakai untuk orang-orang terhormat, berwibawa dan dekat dengan pejabat yang paling tinggi. (Selengkapnya baca Sartono Kartodirdjo, *Perkembangan Peradaban Priyayi Yogyakarta* : Gajah Mada University Press, 1987, hlm. 3-4.)

<sup>22</sup> Robert Van Niel, *Munculnya Elit Modern di Indonesia* (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1984), hlm. 50-51



Kebijakan pertama adalah restrukturisasi sistem pemerintahan daerah pada tahun 1874. Kebijakan ini dikeluarkan dalam rangka menyempurnakan kebijakan politik pintu terbuka yang dilaksanakan pemerintah Hindia-Belanda pada tahun 1870. Politik pintu terbuka yang diterapkan pemerintah Hindia-Belanda membuat pemerintahan Hindia-Belanda melepaskan peran dominannya dalam kegiatan perekonomian dan dialihkan kepada pihak swasta. Ini membuat pengawasan pemerintahan Hindia-Belanda terhadap sistem pemerintahan dibawah hierarkinya semakin ketat, sehingga menyempurnakan transformasi kedudukan bupati dari penguasa menjadi pejabat (priyayi).<sup>23</sup>

Kebijakan tersebut membuat golongan-golongan bangsawan Jawa mau tidak mau harus semakin tunduk dan menjadi bawahan pemerintah Hindia-Belanda. Otoritarianisme pun tercipta antara pemerintah Hindia-Belanda dengan golongan priyayi sebagai akibat perubahan kedudukan bupati yang menjadi lebih legal dan rasional dalam bentuk pemerintahan ala Barat.<sup>24</sup> Otoritarianisme yang dijalankan pemerintah Hindia-Belanda terhadap para priyayi nantinya juga dijalankan oleh para priyayi kepada rakyatnya.<sup>25</sup> Otoritarianisme yang dilakukan golongan priyayi kepada rakyatnya membuat lunturnya ikatan antara “tuan” dan “hamba” yang sudah tertanam di masyarakat Jawa. Dengan lunturnya ikatan tersebut, otomatis kedudukan bangsawan kurang disegani oleh masyarakat dan masyarakat harus

---

<sup>23</sup> Akira Nagazumi, *op. cit.*, hlm. 14.

<sup>24</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru : Sejarah Pergerakan Nasional* (Yogyakarta: Ombak, 2015), hlm. 95.

<sup>25</sup> Sartono Kartodirdjo, *op. cit.*, 1987, hlm. 58.

kehilangan sosok panutan karena sang “tuan” tunduk pada cengkraman pemerintah Hindia-Belanda.<sup>26</sup>

Kedua adalah kebijakan politik etis. Kebijakan politik etis awalnya dicetuskan oleh Van Deventer melalui tulisannya yang berjudul “*Hutang Kehormatan*”. Ia menuntut restitusi Undang-Undang *Comptabiliteit* pada tahun 1867. Daya tarik dari ide restitusi yang dimunculkan oleh Van Deventer serta kelompok pendukung politik etis adalah tumbuhnya kesadaran akan makin berkurangnya kesejahteraan penduduk pribumi akibat tidak adanya pemisahan antara keuangan negeri induk dengan keuangan negeri jajahan. Tidak adanya pemisahan tersebut berimbas pada semakin terpuruknya perekonomian pemerintah Hindia-Belanda termasuk kesejahteraan rakyat.<sup>27</sup> Kelompok pendukung politik etis yang kebanyakan adalah orang-orang berorientasi humanistik dan liberal berupaya untuk mendorong kemajuan negeri Hindia-Belanda agar negeri Hindia-Belanda menjadi negeri yang mampu memberi kesejahteraan bagi penduduk pribumi, tidak hanya kesejahteraan bagi pengusaha swasta asing atau golongan lain. Ditambah sejak berlakunya sistem ekonomi liberal pada tahun 1870 jika penduduk pribumi bisa mencapai tahap kesejahteraan maka akan tercipta sinkronisasi antara kesejahteraan penduduk pribumi dengan kebijakan ekonomi

---

<sup>26</sup> Akira Nagazumi, *op. cit.*, hlm. 16-17.

<sup>27</sup> Marwati Djoened Pusponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid 5* (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), hlm. 22.

liberal.<sup>28</sup> Melalui tiga sila sebagai slogannya yaitu irigasi, edukasi dan emigrasi, kebijakan politik etis lantas diterapkan di Hindia-Belanda pada awal abad 20.<sup>29</sup>

Edukasi sebagai salah satu program dari kebijakan politik etis berhasil memunculkan golongan baru dalam struktur masyarakat Jawa yaitu golongan priyayi profesional. Priyayi profesional adalah orang-orang Jawa yang menduduki jabatan dalam hierarki pemerintah Hindia-Belanda pada periode awal abad-20 karena dasar pendidikan serta keahlian yang dimiliki baik didalam ataupun diluar dari jabatan pangreh praja. Orang-orang Jawa yang dimaksud dari konsep priyayi profesional adalah orang Jawa dari berbagai macam kalangan. Ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi di Hindia-Belanda serta kebutuhan akan tenaga kerja murah membuat pemerintah Hindia-Belanda memberi peluang terbuka bagi siapa saja untuk bisa menjadi golongan priyayi profesional.<sup>30</sup> Selain itu, terdapat dua cara untuk menjadi seorang priyayi profesional yaitu melalui sistem magang, ataupun melalui jalur pendidikan.<sup>31</sup> Beberapa jabatan yang bisa diduduki oleh golongan priyayi profesional dalam hierarki pemerintah Hindia-Belanda seperti yang tertulis dalam koran *Pewartu Priyayi* bulan Agustus tahun 1900 antara lain :

1. Juru tulis kantor pejabat Eropa dan Jawa di pemerintahan dalam negeri
2. Juru tulis pengadilan (griffierr)

<sup>28</sup> Bernard Vlekke, *op. cit.*, hlm. 289-290.

<sup>29</sup> Sartono Kartodirdjo, *op. cit.*, 2015, hlm. 38-39.

<sup>30</sup> Robert Van Niel, *op. cit.*, hlm. 68.

<sup>31</sup> Sistem magang adalah sistem dimana seseorang melalui *ngawula*, *suwita* atau *ngenger* yang artinya mengabdikan diri pada seorang priyayi atau seorang pejabat pemerintahan. Setelah beberapa tahun *ngenger* dan dianggap baik, seseorang yang *ngenger* itu oleh tuannya dimagangkan di kantornya dan terbukalah jalan untuk menjadi priyayi, tetapi kenaikan ke jenjang yang tinggi masih belum tentu terjamin (Selengkapnya baca Sartono Kartodirdjo, *Perkembangan Peradaban Priyayi*, hlm. 103-104)

3. Juru tulis kejaksaan
4. Juru tulis penarik pajak
5. Juru tulis kontrolir
6. Juru tulis kantor syahbandar
7. Juru tulis mantri kehutanan
8. Juru tulis kecamatan
9. Mandor kuli pribumi di syahbandar
10. Polisi kewedanan atau kecamatan
11. Guru sekolah swasta pribumi
12. Polisi pengawasan candu
13. Mantri kehutanan
14. Sipir
15. Opas kantor kontrolir<sup>32</sup>

Selain jabatan-jabatan diatas, beberapa keahlian seperti kedokteran, pertanian, peternakan, pekerjaan umum dan pengadilan juga bisa menduduki jabatan di pemerintahan tersebut.<sup>33</sup> Kebijakan politik etis ini telah berhasil menciptakan fragmentasi yang lebih dalam di struktur masyarakat Jawa melalui kemunculan golongan priyayi baru yaitu priyayi profesional.<sup>34</sup>

Kemunculan golongan priyayi profesional menciptakan dua realita di masyarakat Jawa. Di satu sisi masyarakat yang sebelumnya kurang menyegani kedudukan bangsawan Jawa akan semakin tidak menyegani kedudukan bangsawan karena masyarakat bisa menaikkan status sosialnya dengan menjadi seorang priyayi profesional.<sup>35</sup> Sedangkan bagi bangsawan Jawa, politik etis secara tidak langsung semakin mengancam kedudukan mereka dimata masyarakat serta karir yang mereka miliki. Alhasil, para bangsawan Jawa berlomba-lomba untuk

---

<sup>32</sup> Akira Nagazumi, *op. cit.*, hlm. 31.

<sup>33</sup> Sartono Kartodirdjo, *op. cit.*, 1987, hlm. 102.

<sup>34</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), hlm. 284.

<sup>35</sup> Sartono Kartodirdjo, *op.cit.*, 2015, hlm. 91

menempuh pendidikan jika ingin melanjutkan jenjang karir yang lebih baik karena pemerintah Hindia-Belanda tidak hanya melihat berdasarkan keturunan/warisan. Selain itu menempuh pendidikan merupakan cara bagi bangsawan Jawa untuk tetap memperkuat kedudukan mereka di mata masyarakat.<sup>36</sup>

Terakhir adalah kebijakan desentralisasi oleh pemerintah Hindia-Belanda tahun 1903. Kebijakan desentralisasi merupakan imbas dari semakin kuatnya penguasaan kaum liberal dalam pemerintahan Belanda. Melalui desentralisasi, kaum liberal dalam pemerintahan Belanda berharap Hindia-Belanda menjadi daerah jajahan yang otonom dan mampu mengalami kemajuan prospek ekonomi yang baik bagi negeri Belanda.<sup>37</sup> Demi mendukung tujuan tersebut, pemerintah Hindia-Belanda berupaya melakukan desentralisasi dengan dimulai dari tingkat bawah dan secara bertahap naik hingga nantinya tercipta otonomi di Hindia-Belanda. Undang-undang untuk pelaksanaan desentralisasi sudah disetujui *Staten General* tahun 1903. Rentang waktu 1905 hingga tahun 1907 dewan-dewan kota dibentuk di kota-kota besar seperti Batavia, Meester Cornelis dan Buitenzorg. Sedangkan sesudah tahun 1907, dewan-dewan kota dibentuk hingga tingkat karesidenan dan tersebar di seluruh Jawa.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Akira Nagazumi, *op. cit.*, hlm. 34.

<sup>37</sup> Robert Van Niel, *op. cit.*, hlm. 64-65.

<sup>38</sup> Akira Nagazumi, *op. cit.*, hlm. 28.

Tiga kebijakan tersebut saling berkesinambungan dalam menciptakan perubahan dalam struktur masyarakat Jawa pada periode pergerakan nasional. Golongan priyayi yang tadinya lekat dengan definisi bahwa mereka adalah orang-orang bangsawan/aristokrat Jawa kini telah berubah maknanya. Orang-orang lama yang berasal dari golongan bangsawan/aristokrat Jawa dan menduduki jabatan dalam pemerintahan Hindia-Belanda disebut sebagai golongan priyayi birokrat. Sedangkan bagi masyarakat umum yang berasal dari berbagai kalangan kini mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa menjadi seorang priyayi. Orang-orang baru dalam golongan priyayi tersebut akan dikenal sebagai priyayi profesional.

Banyak yang melihat bahwa kedudukan dua golongan tersebut saling berseberangan, tapi pada nyatanya terdapat satu persilangan di antara dua golongan tersebut. Persilangan antar kedua golongan tersebut tercipta tatkala golongan priyayi profesional sebagai *homines novi* (orang baru) berupaya membuat kedudukannya bisa diterima oleh golongan priyayi birokrat yang sudah lama ada.<sup>39</sup> Meskipun kedudukan golongan priyayi profesional sudah terpandang, namun mereka harus mampu beradaptasi dan terbiasa dengan kehidupan sebagai golongan priyayi. Maka dari itu perkawinan dengan anak dari golongan priyayi birokrat menjadi faktor kunci penerimaan golongan priyayi profesional ke dalam lingkungan kehidupan priyayi birokrat.<sup>40</sup> Ini mengakibatkan terciptanya proses

---

<sup>39</sup> Sartono Kartodirdjo, *op. cit.*, 2015, hlm. 101.

<sup>40</sup> Hal ini pernah ditulis oleh Mas Marco Kartodikromo dalam novelnya berjudul *Student Hidjo*. Dalam novel tersebut, Mas Marco menceritakan bahwa sudah merupakan hal yang lumrah jika seorang

asimilasi antara priyayi birokrat dengan priyayi profesional yang membuat lingkungan keluarga priyayi semakin meluas.<sup>41</sup>

Persilangan yang tercipta antara golongan priyayi birokrat dengan golongan priyayi profesional juga diwarnai perbedaan yang mencolok perihal sikap dan watak dari masing-masing golongan. Golongan priyayi birokrat bisa digambarkan sebagai golongan yang diisi oleh orang-orang lama yang menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional Jawa, berkepribadian moderat, tidak radikal, lebih suka kestabilan daripada dinamikan yang membawa kelabilan. Hal-hal esktrim di jauhi, serta mengusahakan “keharmonisan” (keselarasan). Sikap-sikap tersebut muncul sebagai suatu kesadaran akan posisi *status quo* yang diduduki oleh para priyayi birokrat serta posisi mereka yang menikmati kesejahteraan dalam kedudukan yang terhormat berkat pemerintah Hindia-Belanda.<sup>42</sup> Alhasil, mereka akan menunjukkan sikap yang konservatif ketika memasuki periode pergerakan nasional. Konservatisme itu sesungguhnya wajar ada dikarenakan kedudukan golongan priyayi birokrat berada di posisi yang rumit. Pada satu sisi golongan priyayi birokrat bersifat kooperatif terhadap Hindia-Belanda sebagai bagian dari elit birokrasi, namun di sisi lain golongan priyayi birokrat belum sepenuhnya lepas dari tradisionalisme beserta feodalismenya.<sup>43</sup> Golongan priyayi birokrat juga

---

priyayi profesional menikahi anak dari seorang priyayi birokrat. Hal tersebut digambarkan dalam novelnya melalui tokoh Hidjo yang merupakan seorang priyayi profesional dari Solo yang menikahi Raden Woengo, putri dari Bupati Djarak (Selengkapnya baca Mas Marco Kartodikromo, *Student Hidjo*)

<sup>41</sup> Sartono Kartodirdjo, *op. cit.*, 1987, hlm. 169.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 171.

<sup>43</sup> Savitri Scherer, *Keselarasan dan Kejanggalan : Pemikiran-pemikiran Priyayi Nasionalis Jawa Awal Abad XX* (Depok : Komunitas Bambu, 2012), hlm 178-179.

melihat keberadaan priyayi profesional sebagai sebuah gangguan. Salah satu gangguan yang dirasakan oleh priyayi birokrat adalah etos kerja para priyayi profesional yang hanya didasarkan kerjanya pada keahlian belaka merupakan suatu “pemeriksaan terhadap gejala alam”. Menurut mereka semestinya suatu pekerjaan dikerjakan dengan tujuan penyesuaian diri kepada alam manusia, dalam hal ini kepada seorang atasan.<sup>44</sup>

Kondisi tersebut cukup berbeda dengan golongan priyayi profesional. Pekerjaan yang ditempuh oleh golongan priyayi profesional banyak yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat pribumi semisal guru, ataupun dokter. Meskipun diantara golongan priyayi profesional tersebut ada yang berasal dari golongan priyayi birokrat, tetapi mereka tetap merasakan hal yang sama seperti golongan priyayi profesional lainnya tanpa dibeda-bedakan. Pengalaman yang didapatkan oleh orang-orang di dalam golongan priyayi profesional dengan melihat realita yang ada di masyarakat mampu menyadarkan mereka bahwa mereka mendapatkan kehidupan yang lebih baik dibandingkan masyarakat pribumi lainnya. Ini menjadi dorongan untuk priyayi profesional melakukan perubahan yang lebih baik bagi masyarakat pribumi.<sup>45</sup> Alhasil, banyak diantara priyayi birokrat yang juga menjadi golongan priyayi profesional memilih untuk tidak mengikuti jejak nenek moyang mereka. Golongan priyayi profesional menjelma sebagai wiraswastawan politik. Merekalah yang menjadi pendukung

---

<sup>44</sup> Sartono Kartodirdjo, *op. cit.*, 1987, hlm. 139.

<sup>45</sup> Djoko Marihandono, Yuda Tangkilisan, Jaka Perbawa *Soetardjo Kartohadikoesoemo* (Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012), hlm. 168-170.



ideologi baru, nasionalisme dan menjadi protagonis perjuangan nasional. Sifatnya menjadi radikal dan revolusioner, jadi bertentangan dengan etos priyayi.<sup>46</sup>

Dua golongan tersebut akan memegang peranan penting dalam periode awal masa pergerakan nasional. Baik priyayi birokrat ataupun priyayi profesional berupaya melakukan tindakan-tindakan demi eksistensi masing-masing golongan serta kepentingan yang ingin dicapai. Tetapi salah satu langkah awal yang dilakukan oleh kedua golongan tersebut adalah ketika golongan priyayi birokrat dan priyayi profesional bekerja sama dan mendirikan organisasi Budi Utomo tahun 1908.<sup>47</sup>

## **B. Kelahiran Budi Utomo**

Dinamika perpolitikan di negeri induk merupakan hal yang sangat mempengaruhi kebijakan pemerintah di Hindia-Belanda. Hal tersebut dapat dilihat dalam kurun waktu 1830 hingga akhir abad 19. Berbagai kebijakan silih berganti diterapkan di Hindia-Belanda. Mulai dari kebijakan tanam paksa pada tahun 1830, kebijakan sistem ekonomi liberal tahun 1870, hingga kebijakan politik etis dipenghujung abad 19.<sup>48</sup> Dari berbagai kebijakan tersebut, politik etis menjadi titik penting dalam sejarah Indonesia. Melalui kebijakan tersebut upaya untuk peduli terhadap nasib rakyat pribumi semakin digiatkan dan menciptakan perubahan dalam pola perjuangan rakyat Indonesia.

---

<sup>46</sup> Sartono Kartodirdjo, *op. cit.*, 1987, hlm. 177.

<sup>47</sup> Robert Van Niel, *op. cit.*, hlm. 87-88.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 17-18.

Kemunculan kebijakan politik etis bermula dari berkuasanya partai liberal dalam pemerintahan di Belanda. Berkuasanya partai liberal dalam pemerintahan di Belanda membuat banyak kebijakan di negeri Belanda mengedepankan asas-asas liberal. Kebijakan awal ketika partai liberal berkuasa di Hindia-Belanda adalah sistem ekonomi liberal tahun 1870. Melalui kebijakan tersebut perekonomian di Hindia-Belanda tidak lagi bergantung terhadap pemerintah Hindia-Belanda, tapi dilepaskan kepada pihak swasta yang menanamkan modalnya di Hindia-Belanda.<sup>49</sup> Namun, salah satu kebijakan penting ketika partai liberal berkuasa dalam pemerintahan Belanda adalah kebijakan politik etis yang dimunculkan oleh Van Deventer.<sup>50</sup>

Kebijakan politik etis khususnya di bidang edukasi benar-benar menjadi perhatian dari kelompok pendukung politik etis. Beberapa tokoh seperti Snuock Hurgronje dan J.H. Abendanon melakukan aksi nyata dalam peningkatan pendidikan bagi masyarakat pribumi. Snuock Hurgronje melalui dorongannya terhadap pemberian pendidikan kepada elit pribumi dalam tradisi yang paling baik dari Barat, sedangkan J.H. Abendanon yang menjabat sebagai dewan pendidikan di Hindia-Belanda memberikan dorongan terhadap golongan muda pribumi akan pentingnya pendidikan.<sup>51</sup> Kepedulian kelompok pendukung politik etis terhadap pendidikan nantinya berhasil menciptakan tokoh-tokoh pribumi yang juga menaruh perhatian perihal pendidikan bagi pribumi. Salah satu tokoh

---

<sup>49</sup> Robert Van Niel, *op. cit.*, hlm. 18.

<sup>50</sup> Selengkapnya baca hlm. 33-34 penelitian ini perihal politik etis serta berbagai kebijakannya.

<sup>51</sup> Robert Van Niel, *op. cit.*, hlm. 54-55.

yang menaruh perhatian perihal pendidikan bagi pribumi adalah Wahidin Sudirohusodo.

Wahidin lahir tahun 1857 di desa Melati, sekitar kaki gunung Merapi, Yogyakarta. Wahidin merupakan seorang priyayi profesional dengan gelar Mas Ngabehi. Kedudukan priyayi profesional ia dapatkan ketika memasuki sekolah Dokter Jawa atau yang lebih dikenal sebagai STOVIA tahun 1869. Selama bersekolah di STOVIA, ia merupakan siswa yang pandai sehingga tahun 1872 ia diangkat sebagai asisten di STOVIA. Karirnya berlanjut ketika ia kembali ke Yogyakarta dan melepaskan jabatannya sebagai asisten STOVIA untuk menjadi pegawai kesehatan pemerintah sampai September 1899. Di tahun 1901, Wahidin menjadi redaktur majalah *Retnodhoemilah*.<sup>52</sup>

Kepedulianya terhadap pendidikan berasal dari perjalanan hidupnya yang hanyalah anak dari kalangan orang bawah dan ia mampu menjadi seorang priyayi profesional berkat pendidikan yang digalakan oleh kebijakan politik etis. Wahidin percaya bahwa politik etis mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk pribumi.<sup>53</sup> Ketika ia menduduki jabatan redaktur *Retnodhoemilah* ia banyak menulis karangan bernada aktif serta menerapkan kebijakan untuk menerbitkan *Retnodhoemilah* dalam bahasa melayu sedang agar bisa dibaca semua kalangan. Gagasan-gagasan yang disampaikan Wahidin dalam *Retnodhoemilah* perihal

---

<sup>52</sup> Akira Nagazumi, *op. cit.*, hlm. 42-43.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

pendidikan nyatanya mendapat tanggapan yang dingin dari masyarakat Jawa.<sup>54</sup> Akhirnya Wahidin memutuskan meninggalkan jabatan ketua redaksi *Retnodhoemilah* pada bulan November 1906.

Sekeluanya dari *Retnodhoemilah*, Wahidin memutuskan semakin menggalakan program pemberian beasiswa bagi anak-anak muda pribumi yang pandai pada tahun 1906.<sup>55</sup> Dalam upayanya mencapai tujuan tersebut, Wahidin didampingi Pangeran Ario Notodirodjo, putra Pakualam V.<sup>56</sup> Bersama Pangeran Ario Notodirodjo, Wahidin melakukan perjalanan kampanye untuk meminta bantuan terkait program pemberian beasiswa bagi anak-anak muda pribumi. Mereka berkeliling pulau Jawa mendekati para priyayi birokrat yang kaya untuk menyokong gagasan Wahidin tersebut. Upaya Wahidin serta Pangeran Ario Notodirodjo mendapatkan dukungan serta penolakan. Dukungan datang dari beberapa bupati di Jawa. sedangkan nada penolakan juga bermunculan dikarenakan upaya Wahidin dianggap mengguncang ketenteraman dan ketertiban sistem yang berlaku.<sup>57</sup>

---

<sup>54</sup> Beberapa gagasan Wahidin muncul dalam karangan yang terbit berturut-berturut pada bulan Mei 1905, mulai dari terbitan *Retnodhoemilah* No 36,37 dan 39 tahun 1905. Dalam tiga karangan tersebut Wahidin menggunakan nama pena Pak Minta. Gagasannya antara lain : Mendirikan organisasi bangsa Jawa yang baru untuk mendorong pendidikan bagi lapisan kaum tua masyarakat Jawa, mendorong masyarakat Jawa untuk menguasai bahasa Belanda serta menggalakan bantuan dana dari orang Jawa untuk keberlangsungan organisasi bidang pendidikan tersebut. (Selengkapnya baca *Retnodhoemilah*, No. 36, 12 Mei 1905; *Retnodhoemilah*, No. 37, 16 Mei 1905; *Retnodhoemilah*, No. 39, 26 Mei 1905.)

<sup>55</sup> Marwati Djoened Puspongoro dan Nugroho Notosusanto, *op. cit.*, hlm. 335.

<sup>56</sup> Pangeran Ario Notodirodjo lahir tahun 1858 dan berasal dari kalangan bangsawan Jawa. Ia mengenyam pendidikan di sekolah dasar Eropa, sekolah menengah Belanda atau Hoogere Burgerschool di Batavia, dan kemudian di Semarang. Setelah dinas sebagai militer, ia diangkat sebagai pangeran, dan diberi tugas melakukan pembaharuan keuangan dalam Kerabat Pakualam.

<sup>57</sup> Akira Nagazumi, *op. cit.*, hlm. 51-52.

Mimpi Wahidin akhirnya menuai harapan ketika ia sedang beristirahat di Batavia pada akhir tahun 1907 dalam perjalanan menggalakan kampanye beasiswa pendidikan. Ketika beristirahat di Batavia ia bertemu dengan Soetomo dan Soeradji yang merupakan murid STOVIA, tempat dimana dulu Wahidin menempuh pendidikan.<sup>58</sup> Soetomo dan Soeradji lantas mengundang Wahidin untuk datang ke STOVIA dan menyampaikan gagasan-gagasannya. Dalam pertemuan tersebut Soetomo menceritakan kesannya terhadap Wahidin dalam memoarnya, ia menulis :

Yang membikin saya terkejut dan tertarik ialah perangai dan pikiran dokter tua ini. Ia mampu memusatkan kegiatannya dan mengatasi rintangan-rintangan yang terus menerus menghalangi cita-citanya. Saya berhadap dengan Dokter Wahidin Soedirohoesodo, yang berwajah tenang tapi tajam, dan kepandaianya mengutarakan pikirannya sangat berkesan pada saya. Suaranya yang jelas dan tenang membuka pikiran dan hati saya, membawa gagasan-gagasan baru dan membuka dunia baru yang meliputi jiwa saya yang terluka dan sakit. Berbicara dengan Dokter Wahidin merupakan pengalaman yang sangat mengharukan; dengan mudah orang akan tahu tentang luhurnya semangat pengabdian dokter ini.<sup>59</sup>

Pertemuan tersebut mampu membangkitkan semangat Soetomo dan Soeradji untuk ikut serta mendukung gagasan dr. Wahidin perihal pendirian perkumpulan yang mendorong pendidikan bagi pribumi di Jawa.<sup>60</sup> Dengan semangat tersebut, Soetomo bersama Soeradji berkeliling dari satu kelas ke kelas lain untuk mencari dukungan siswa-siswa STOVIA dalam rangka mendirikan perkumpulan tersebut.

<sup>58</sup> Marwati Djoened Puspongoro dan Nugroho Notosusanto, *loc. cit.*

<sup>59</sup> Akira Nagazumi, *op. cit.*, hlm. 53.

<sup>60</sup> Gagasan ini pernah ditulis oleh Dokter Wahidin dalam tulisan di majalah *Retnodhoemilah* tahun 1905 No. 36. dengan nama pena Pak Minta. (Selengkapnya baca *Retnodhoemilah*, No. 36, 12 Mei 1905)

Akhirnya pada hari minggu tanggal 20 Mei 1908 didirikanlah organisasi bernama Budi Utomo<sup>61</sup> oleh Soetomo serta siswa-siswa STOVIA lainnya. Dalam acara pendirian organisasi tersebut tidak hanya dihadiri oleh siswa STOVIA, melainkan juga dihadiri oleh siswa-siswa sekolah pertanian dan kehewanan di Bogor, sekolah pamong praja di Magelang dan Probolinggo, sekolah menengah petang di Surabaya dan sekolah-sekolah pendidikan guru pribumi di Bandung, Yogyakarta dan Probolinggo.<sup>62</sup>

Pasca pendiriannya, Soewarno yang menjabat sebagai sekretaris sementara Budi Utomo mengatakan bahwa Budi Utomo akan melaksanakan kongres pertama pada bulan Oktober di Yogyakarta dan terbuka untuk umum. Pemilihan Yogyakarta sebagai tempat kongres dikarenakan Yogyakarta dipandang sebagai “tempat denyut jantungnya Jawa” dan juga keberadaan Pangeran Ario Noto Dirodjo yang berasal dari Pakualaman Yogyakarta dirasa dapat melindungi jalannya kongres tanpa gangguan dari pemerintah Hindia-Belanda.<sup>63</sup> Selama kurun waktu Juli-September anggota Budi Utomo semakin bertambah dan juga para anggota semakin mempersiapkan diri dalam rangka pelaksanaan kongres

---

<sup>61</sup> Nama Budi Utomo muncul dalam sebuah anekdot saat dr. Wahidin berbincang dengan pelajar STOVIA saat diundang oleh Soetomo dan Soeradji. Ketika dr. Wahidin menceritakan cita-citanya dan akan melanjutkan perjalanannya ke Banten, Soetomo berbicara dalam bahasa Jawa : “puniko pedamelan ingkang sae, membuktikan budi ingkang utami”, artinya : yang tuan maksudkan itu suatu pekerjaan yang baik dan membuktikan suatu budi, suatu tabiat yang utama. Perkataan tersebut didengarkan kawan Soetomo, Dr. Soeradji sehingga ketika mereka mendirikan perkumpulan ini diusulkanlah agar diberi nama Budi Utomo. (Selengkapnya baca Cahyo Budi Utomo, *Dinamika Pergerakan Kebangsaan Indonesia dari Kebangkitan hingga Kemerdekaan*, hlm. 50-51.)

<sup>62</sup> Akira Nagazumi, *op. cit.*, hlm. 62.

<sup>63</sup> Takashi Shiraishi, *Zaman Bergerak : Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926* (Jakarta: Pustaka Utama, 1997), hlm 50-51.

pertama Budi Utomo. Surat-menyurat pun terjalin antara siswa-siswa STOVIA dengan beberapa tokoh priyayi birokrat seperti R.M.A.A. Koesomo Oetoyo, R.A.A.A. Djajadiningrat dan R.A.A Tirtokoesomoe. Melalui surat menyurat tersebut, banyak tokoh priyayi birokrat yang setuju dan berjanji akan mendorong kemajuan organisasi Budi Utomo. Keberhasilan siswa-siswa STOVIA dalam mendekati golongan priyayi birokrat lebih dikarenakan mereka hanya mendekati golongan priyayi birokrat yang berpikiran terbuka, terdidik serta sudah tergugah hatinya.<sup>64</sup>

Kongres pertama dilaksanakan selama tiga hari sejak tanggal 3 sampai 5 Oktober 1908 di Yogyakarta.<sup>65</sup> Hari pertama kongres diwarnai oleh hal menarik ketika terjadi perdebatan gagasan antara yang disampaikan oleh Raden Ngabehi Wediodipoero atau lebih dikenal dengan nama dr. Radjiman dengan dr. Tjipto Mangoenkoesomo. Perdebatan gagasan yang terjadi antara dua tokoh tersebut berkuat perihal harus dimulai darimana upaya perluasan pendidikan barat bagi masyarakat Jawa. dr. Radjiman berpendapat bahwa pendidikan barat harus diperluas terlebih dahulu di golongan priyayi. Bahkan ia menyampaikan dengan kata-kata yang kurang tepat bahwa “ilmu pengetahuan Barat bukan saja tidak perlu tetapi juga tak mungkin bagi penduduk pribumi”. Sedangkan dr. Tjipto dengan berapi-api mengatakan bahwa pendidikan Barat haruslah dimulai dari masyarakat bawah dan menganggap pendidikan barat adalah kunci untuk

---

<sup>64</sup> Akira Nagazumi, *op.cit.*, hlm. 70.

<sup>65</sup> A.K. Pringgodigdo, *op. cit.*, hlm. 1.

merongrong hierarki sosial tradisional.<sup>66</sup> Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa kedua golongan priyayi yang berada di dalam Budi Utomo mempunyai perbedaan pandangan yang cukup tajam, dr. Radjiman merepresentasikan para priyayi birokrat dan dr. Tjipto merepresentasikan para priyayi profesional. Konflik tersebut merupakan antagonisme antara konservatisme dengan progresivisme/radikalisme mengenai tujuan Budi Utomo serta keinginan mendorong organisasi Budi Utomo sebagai sebuah organisasi sosial atau malah menekankan Budi Utomo sebagai gerakan bersifat politik.<sup>67</sup>

Hari kedua kongres berfokus dalam memilih badan pengurus organisasi. Badan pengurus organisasi Budi Utomo terdiri atas seorang ketua, wakil ketua, sekretaris kesatu dan kedua, bendahara dan empat orang komisaris.<sup>68</sup> Selain pembentukan badan organisasi, kongres pertama Budi Utomo juga berhasil merumuskan naskah bersih AD/ART yang mencantumkan tujuan organisasi sebagai berikut :

- Secara khusus organisasi akan mencurahkan perhatiannya pada :
- (a) Kepentingan pendidikan dalam arti seluas-luasnya;
  - (b) Perbaikan pertanian, peternakan dan perdagangan;
  - (c) Perkembangan teknik dan industri;
  - (d) Menumbuhkan kembali kesenian dan tradisi pribumi;
  - (e) Menjunjung tinggi cita-cita umat manusia pada umumnya;

<sup>66</sup> Akira Nagazumi, *op.cit.*, hlm. 76-79.

<sup>67</sup> Sartono Kartodirdjo, *op. cit.*, 2015, hlm. 119-120.

<sup>68</sup> Badan Pengurus Organisasi Budi Utomo hasil kongres pertama diisi oleh : (1) Ketua, R.A.A. Tirtokoesomo; (2) Wakil Ketua, M. Ng. Soedirohoesodo; (3) Sekretaris pertama, M. Ng. Dwidjosewejo; (4) Sekretaris Kedua, R. Sosrosoegondo; (5) Bendahara, R.M.P. Gondoatmodjo; (6) Komisaris, R.M.A. Soerjodipoetro; (7) Komisaris, M. Tjipto Mangoenkoesoemo; (8) Komisaris, R. Djajasoebrata; (9) Komisaris, R.M.P Gondosoemarjo.



(f) Hal-hal lain yang bisa membantu meningkatkan kesejahteraan bangsa.<sup>69</sup>

Dari kongres pertama Budi Utomo, kita dapat melihat bahwa organisasi Budi Utomo berdiri dengan kerangka organisasi yang diisi oleh mayoritas golongan priyayi profesional serta priyayi birokrat menjadi minoritas dalam keanggotaan organisasi, meskipun secara posisi jabatan priyayi birokrat banyak menduduki posisi-posisi penting. Terlepas dari jumlah priyayi profesional yang lebih dominan dibanding priyayi birokrat, priyayi profesional nyatanya masih merasa canggung dan tetap menghormati kedudukan priyayi birokrat.<sup>70</sup> Ini tercermin dalam ketentuan penggunaan bahasa ketika rapat-rapat resmi Budi Utomo berlangsung. Ketika kongres pertama Budi Utomo, bahasa Belanda banyak digunakan oleh peserta khususnya dari golongan priyayi profesional sebagai bahasa pengantar. Keengganan priyayi profesional menggunakan bahasa Jawa lebih didasarkan adanya rasa canggung dari mereka ketika berbicara dengan priyayi birokrat yang memiliki pengetahuan akan kebudayaan Jawa yang lebih tinggi. Maka dari itu demi menciptakan kemudahan serta ketidak canggungan dalam berkomunikasi antar anggota, dipilihlah bahasa Melayu karena bahasa Melayu dianggap lebih demokratis serta menghindari kemungkinan berbagai salah ucap.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> Akira Nagazumi, *op. cit.*, hlm. 91.

<sup>70</sup> Koentjaraningrat, *op. cit.*, hlm 87.

<sup>71</sup> Pembicaraan dengan menggunakan bahasa Jawa rentan mengalami salah ujaran, dan jika terjadi salah ujaran maka dalam sopan santun Jawa hal tersebut dirasakan sebagai kesalahan yang sangat memalukan (Selengkapnya baca Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* hlm. 87.)

Keberlangsungan Budi Utomo dalam tahun-tahun berikutnya diwarnai dinamika organisasi yang terus menerus terjadi. Dua golongan priyayi yang terdapat dalam Budi Utomo berupaya untuk menerapkan pandangan golongannya sebagai arah keberlangsungan organisasi.<sup>72</sup> Dinamika yang terus terjadi tersebut akan membuat Budi Utomo mengalami pelemahan kedudukan serta penurunan pamor dibandingkan organisasi-organisasi setelahnya semisal Sarekat Islam. Penurunan pamor inilah yang akan membuat organisasi Budi Utomo secara perlahan akan berubah haluan dan mulai terjun dalam kiprah politik.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Robert Van Niel, *op. cit.*, hlm. 88.

<sup>73</sup> A.K. Pringgodigdo, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia* (Jakarta: Dian Rakyat, 1994), hlm. 2.